

KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN JEPANG DALAM BIDANG PERTAHANAN TAHUN 2015

Oleh: Oki Rilo Nainggolan
(okirilo.n@gmail.com)

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain the interests of Indonesia in cooperation with Japan in the field of defense in 2015. The agreement is set forth in a Memorandum of Understanding on cooperation and exchange in the field of defense on March 23, 2015 in Japan. The agreement was signed by the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Ryamizard Ryacudu and Japanese Defense Minister Gen Nakatani.

In this research, the author used national interest concept and the theory of foreign policy strategic model / rational model and the theory of international cooperation by Kalevi Jaako Holsti. This research used qualitative research that attempt to express an essence of social phenomena by analyzing the phenomenon based on existing theories and data. Data collection techniques from this research is library research where the data comes from books, newspapers, journals, official documents, internet and other data that support in writing this research.

The result of this research is the cooperation between Indonesia and Japan in the field of defense in 2015 aims to meet the needs of Indonesia in improving its defense in terms of quality and quantity through modernization of Indonesia's defense equipment, Transfer of Technology, information exchange on defense matters, exchanges and training of personnel, And experts, and other forms and the fulfillment of Minimum Essential Force Phase II can be met maximally. Indonesia's desire to become a maritime axis of the world is also increasingly realized and make Indonesia's defense industry more independent with the cooperation.

Keywords: *Jakarta Declaration, International Relations, National Interest, Defense Cooperation, Modernization of Defense Equipments.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti

di utara berbatasan dengan Malaysia, Siangapura, Filipina dan Laut Cina Selatan, di timur berbatasan dengan Papua Nugini dan samudera Pasifik, dan di selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia sangat berkepentingan dalam menciptakan keamanan di kawasan, termasuk keamanan maritim dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang handal sangat diperlukan.¹

Pertahanan Negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.² Pertahanan Negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.³

Untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya dipengaruhi oleh diplomasi politik pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan militer yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan

modernisasi pada Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) supaya dapat bekerja secara maksimal dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh, Alutsista semakin lengkap, dan modern. Demi terwujudnya kemandirian pertahanan, Indonesia melakukan beberapa kerjasama pertahanan dengan negara lain, salah satunya adalah Jepang.

Kondisi geografis dan geopolitik yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia, membuat Indonesia memilih Jepang sebagai mitra kerjasamanya, khususnya dalam bidang pertahanan. Kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pertahanannya serta mendukung kebijakan dari presiden Joko Widodo, di mana kebijakan beliau yaitu, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang⁴. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.⁵

¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015) Hal. iv

² Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015)

³ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 200, 2015)

⁴ Pampasan Perang adalah penggantian daripada kerusakan, kerugian dan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Indonesia selama perang dunia kedua. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perjanjian Pampasan Perang Indonesia-Jepang lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1958 tentang Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang.

⁵ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*, Tersedia di

Kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang ini disepakati dalam sebuah nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Nota kesepakatan ini ditandatangani di Jepang oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani pada tanggal 23 Maret 2015. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk kerangka kerja guna meningkatkan kerjasama dan pertukaran berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara.⁶

Indonesia sudah menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara yang ada dunia diantaranya adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Swedia, dan masih banyak lagi. Namun, hal ini belum memenuhi seutuhnya kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan pertahanan negaranya. Itulah sebabnya Indonesia menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain, yaitu Jepang. Dengan begitu, penulis menarik sebuah fokus penelitian, yaitu “Mengapa Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Jepang tahun 2015?”

Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep

kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi.⁷

Politik luar negeri merupakan sarana untuk merealisasikan kepentingan nasional dan hal yang paling mendasar dalam pengambilan keputusan luar negeri suatu negara adalah kepentingan nasional. Kondisi politik suatu negara mempengaruhi produk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) suatu negara. Kondisi politik dalam negeri mampu mendorong kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk memenuhi beberapa kepentingan nasional suatu negara.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori politik luar negeri model strategik/Model Rasional (*Strategic/Rational Model*) dan Teori Kerjasama Internasional. Asumsi dasar dari teori politik luar negeri model strategik/Model Rasional (*Strategic/Rational Model*) adalah bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan perhitungan rasional di dalam kancah politik global. Fokus perhatian para penstudi yakni lebih menekankan pada transaksi/interaksi antar pihak-pihak

<http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html> [Di akses tanggal 24 Oktober 2016].

⁶ Republik Indonesia, Ayat 1 Memorandum Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang Tentang Kerjasama dan Pertukaran di Bidang Pertahanan.

⁷ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 35

yang terlibat daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja. Didalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan.⁸ Menurut John P. Lovell, strategi adalah serangkaian langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.⁹

Lovell telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang memengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara bangsa, yaitu struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut.¹⁰

Kalevi Jaako Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan

persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.¹¹

Tujuan utama suatu negara dalam melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.¹²

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang adalah kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menitikberatkan pada kepentingan nasional suatu negara, karena kerjasama ini memiliki sifat yang sensitif karena menyangkut kedaulatan, keamanan, kestabilan dan kesejahteraan rakyat.

Kerjasama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dan tidak jelas, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerjasama akan tertulis pada perjanjian (apapun namanya), antara lain untuk:

⁸ *Ibid*, Hal. 61

⁹ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989), Hal 90

¹⁰ Yanyan Mochamad Yani, *Perspektif-perspetif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis*, 14 Mei 2008, Tersedia di <http://repository.unpad.ac.id/5894/1/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf> [Diakses tanggal 20 November 2016].

¹¹ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988) Hal. 652-653

¹² Sjamsumar Dam & Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) Hal. 15

- a) Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia.
- b) Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat.
- c) Mempererat dan meningkatkan kerjasama bilateral.
- d) Mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara.
- e) Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan.
- f) Meningkatkan dan mempererat kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.
- g) Meningkatkan saling percaya.
- h) Mengintegrasikan persetujuan-persetujuan yang sudah ada (bila sebelumnya sudah ada persetujuan).
- i) Meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.¹³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *qualitative research* yang berusaha untuk mengungkapkan suatu hakekat dari fenomena sosial dengan cara menganalisis fenomena tersebut berdasarkan teori dan data-data yang ada. Berdasarkan permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori dan data yang ada untuk mengungkapkan mengenai kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Jepang dalam bidang pertahanan tahun 2015.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dan mengkaji sesuai dengan kerangka teori yang relevan. Data-data tersebut berasal dari buku, surat kabar, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Data-data

seperti ini biasa disebut data sekunder atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Penulis mengambil batasan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya mengkaji tentang kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Penulisan ini memiliki jangkauan penelitian sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* pada tahun 2015 hingga saat ini (2017). Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan data yang relevan dari waktu sebelumnya untuk mendukung penulisan penelitian ini.

II. Pembahasan

Hubungan baik dan harmonis yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang saat ini merupakan hasil dari Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh keduanya. Namun, untuk mencapai kesepakatan Perjanjian Perdamaian antara Indonesia dengan Jepang tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Banyak kesulitan dan ketidaksepahaman antara kedua negara yang menyebabkan kesepakatan ini begitu banyak memakan waktu dan tenaga.

Kesepakatan perjanjian perdamaian antara Indonesia dengan Jepang bermula dari Perjanjian San Fransisco (*Treaty of San Fransisco*). Amerika Serikatlah yang mengadakan pertemuan tersebut pada pertengahan tahun 1951 di San Fransisco. Pertemuan tersebut diikuti oleh 49 negara termasuk salah satunya Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merundingkan Perjanjian Perdamaian dan Pampasan Perang dengan Jepang. Indonesia mengutus perwakilannya, yaitu Menteri Luar Negeri, Achmad Soebardjo untuk berangkat menghadiri pertemuan tersebut di San Fransisco.

¹³ Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hal. 150

Perjanjian Pampasan Perang ini ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958 oleh Menteri Luar Negeri Jepang Fujiyama dan Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dengan ketentuan, antara lain:

1. Jepang akan membayar US\$223.080.000 selama 12 tahun.
2. Jepang akan menghapuskan utang niaga Indonesia sebesar US\$176.920.000
3. Jepang akan memberikan bantuan ekonomi sebesar US\$400.000.000¹⁴

Perjanjian Damai dan Pampasan Perang antara Indonesia dengan Jepang disahkan oleh DPR Republik Indonesia tanggal 13 Maret 1958 dan diundangkan pada tanggal 27 Maret 1958. Dengan diundangkannya Perjanjian Perdamaian dan Pampasan Perang tersebut maka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang resmi di buka pada bulan April 1958. Setelah dibukanya hubungan diplomatik tersebut, Indonesia dan Jepang mulai membina hubungan mereka dengan mengadakan kerjasama-kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Sampai saat ini hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang sangat harmonis, bahkan Jepang merupakan salah satu mitra kerjasama terbesar Indonesia.

Sejak tahun 1966 sampai sekarang, Indonesia dan Jepang sudah melakukan lebih dari 200 pertukaran nota kerjasama, khususnya yang berkaitan di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan Jepang terhadap Indonesia. Indonesia dan Jepang juga menjalin kerjasama sebagai sesama anggota

organisasi atau forum regional maupun internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO), *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Asia-Europe Meeting* (ASEM).

Kebijakan pertahanan Indonesia pada era Presiden Joko Widodo saat ini memiliki empat prioritas utama, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, maupun penyediaan alutsista; mendukung kemandirian pertahanan agar mampu menghindari ketergantungan pada pasokan produk impor; membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani; dan menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.¹⁵ Apalagi fokus utama Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Posisi Indonesia yang sangat strategis membuat permasalahan yang dihadapinya pun beragam. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia ini berupa ancaman militer maupun non militer seperti terorisme, pencurian sumber daya alam, pelanggaran batas wilayah, pembajakan baik di laut maupun udara, bencana alam, narkoba, spionase, *cyber war*, *proxy war*, penyelundupan, imigran gelap, wabah penyakit, konflik terbuka atau perang konvensional, dan kriminal lintas batas lainnya.

¹⁴ Opie. *Perjanjian Pampasan Perang Jepang*. 29 Oktober 2014. Tersedia di <<http://www.sejarawan.com/190-perjanjian-pampasan-perang-jepang.html>> [Diakses 10 April 2017].

¹⁵ Resty Armenia, *Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas*, CNN Indonesia, 31 Desember 2014. Tersedia di <<http://www.cnnindonesia.com/politik/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas/>> [Diakses 17 April 2017].

Indonesia saat ini sedang berusaha mempercepat pembangunan pertahanannya yang dituangkan ke dalam kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF). MEF merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010. MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan pembangunan komponen utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan senjata (*arms race*) maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal.¹⁶ MEF terbagi menjadi tiga tahap di mulai dari Tahap I 2010-2014, Tahap II 2015-2019, dan Tahap III 2020-2024.

Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo alokasi anggaran MEF Indonesia Tahap II tahun 2015-2019 diusulkan sebesar Rp 532,3 triliun dengan *baseline* pemerintah sebesar Rp 293,5 triliun atau naik 44% dari tahap pertama yang dianggarkan sebesar Rp 156 triliun dengan realisasi Rp 122,2 triliun atau 74,98%. Kenaikan anggaran tersebut akan mengacu pada kebijakan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), yang meliputi Alutsista dari PLN 2015-2019 adalah sebesar US\$7,745 miliar dengan rincian Mabes TNI US\$135,2 juta, TNI AD US\$1,59 miliar, TNI AL US\$2,28

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 650

miliar, dan TNI AU US\$3,19 miliar. Sedangkan PDN 2015-2019 adalah Rp 14,99 triliun yang terdiri dari Mabes TNI Rp 880 miliar, TNI AD Rp 3,94 triliun, TNI AL Rp 6,95 triliun, dan TNI AU Rp 3,22 triliun.¹⁷

Alat Utama Sistem Pertahanan Indonesia

Dari tahun 2010 hingga tahun 2017 anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia naik hingga 154,8%. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 ditetapkan anggaran pertahanan sebesar Rp 108 triliun atau rata-rata naik sekitar 16,6% per tahun. Berikut adalah tabel perkembangan anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017.

Pada tahun 2014, Indonesia merupakan negara pengimpor nomor 15 terbesar di dunia dalam hal peralatan, menurut data IHS dengan nilai impor peralatan sebesar US\$1,8 miliar. Pemasok terbesar tunggal peralatan ke Indonesia tahun lalu adalah Korea Selatan sebesar US\$450 juta.¹⁸ Jumlah personel TNI aktif yang siap bertugas di garis depan pada tahun 2015 sebanyak 476 ribu orang dengan pasukan cadangan sebanyak 400 ribu orang. Indonesia memiliki 400 unit tank lapis baja, 506 unit kendaraan tempur lapis baja, 62 unit artileri jarak jauh, 50 unit peluncur roket, 3.350 unit mortir, 11.000 unit senjata anti tank, 11.100 unit

¹⁷ Dewi Rachmat Kusuma, *Menhan Ajukan Dana Pertahanan Rp 532 T Untuk 5 Tahun, Naik 44%*, Detik.com 19 Oktober 2015. Tersedia di <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3047579/menhan-ajukan-dana-pertahanan-rp-532-t-untuk-5-tahun-naik-44>> [Diakses 18 April 2017].

¹⁸ Jane, *Indonesia, Pertumbuhan Anggaran Pertahanan Terbesar di Asia Pasifik*, JakartaGreater.com 25 Mei 2015. Tersedia di <<https://jakartagreater.com/indonesia-pertumbuhan-anggaran-pertahanan-terbesar-di-asia-pasifik/>> [Diakses 18 April 2017].

kendaraan angkut logistik, 150 unit kapal perang, 2 unit kapal selam, 26 unit kapal angkut personel, 23 unit kapal kelas korvet, 6 unit kapal kelas frigat, 70 unit kapal patroli, dan 118 unit pesawat tempur (50 unit pesawat tempur sergap dan 68 unit pesawat tempur taktis).¹⁹

Adapun rencana pengadaan Alutsista yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dalam rangka pemenuhan MEF adalah sebagai berikut.²⁰

1. Kontrak efektif untuk 22 jenis Alutsista Strategis.
2. Kontrak efektif untuk 20 jenis Alutsista produksi industri pertahanan.
3. 24 unit panser pengganti Sarasen dan Saladin.
4. 20 unit meriam Artileri Medan (Armed).
5. Pengadaan lanjutan helikopter Apache.
6. 8 jenis munisi senjata KRI.
7. Satu Satbak rudal jarak sedang.
8. 14 unir rudal *air to air*.
9. 55 unit kendaraan taktis (Rantis).

Pengadaan Alutsista diatas, dilakukan bersamaan dengan penguatan industri pertahanan, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Pengembangan Pesawat KFX/IFX
2. Pembuatan Prototype Medium Tank
3. *Transfer of Technology* Rudal C-705
4. Habituation Roket R-Han 122 B²¹

¹⁹ Tempo.co, *Kekuatan Militer Indonesia Peringkat Keempat Asia*, 12 Agustus 2016. Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/2016/08/12/078795512/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-keempat-asia>> [Diakses 18 April 2017].

²⁰ Militerhankam, *Modernisasi dan Pembelian Alutsista Baru Militer Indonesia 2017*, Tersedia di <<http://www.militerhankam.com/2017/03/modernisasi-dan-pembelian-alutsista.html>> [Diakses 18 April 2017].

²¹ Diego, *Daftar Pembelian Alutsista TNI Tahun 2017*, 7 September 2016. Tersedia di

Saat ini, Alutsista yang dimiliki TNI AD adalah 418 unit tank (*main battle tank*, tank ringan, dan tank penghancur), 1089 unit kendaraan tempur lapis baja (*Armored Fighting Vehicles*), 37 unit Senjata Gerak Sendiri (*Self-Propelled Guns*), 80 unit artileri tarik (*Towed-Artillery*), dan 86 unit sistem peluncur roket (*Multiple-Launch Rocket Systems*).²²

Adapun kekuatan atau Alutsista yang dimiliki TNI AL saat ini adalah 221 unit kapal perang, 7 unit kapal frigat, 24 unit kapal korvet, 4 unit kapal selam, 74 unit kapal pertahanan pesisir, 12 unit kapal *Mine Warfare*.²³ TNI AU memiliki 441 unit pesawat terbang, 39 unit pesawat tempur/pesawat penyergap, 58 unit pesawat terbang sayap tetap, 170 unit pesawat angkut, 111 unit pesawat latih, 147 unit helikopter, dan 5 unit helikopter serang.²⁴

Alasan Indonesia memilih Jepang sebagai Mitra Kerjasamanya di Bidang Pertahanan

Dalam analisis strategi pada politik luar negeri, pembuat keputusan harus mengetahui situasi dan menentukan sasaran yang hendak dituju. Teori strategi didasarkan atas pertimbangan pembuat keputusan dalam rangka memperhitungkan untung dan rugi dalam pencapaian tujuan strategi itu sendiri.²⁵

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dalam bidang pertahanan

<<https://jakartagreater.com/daftar-pembelian-alutsista-tni-tahun-2017/>> [Diakses 19 April 2017].

²² Global Fire Power, *Indonesia Military Strength, Current Military Capabilities and Available Firepower for 2017 Detailed*, Tersedia di <http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia> [Diakses 19 April 2017].

²³ Global Fire Power., *loc. cit*

²⁴ Global Fire Power, *loc.cit*.

²⁵ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Op.cit., Hal. 90-91

tersebut tentunya memiliki alasan tertentu. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan atas kepentingan nasional Indonesia yang berdasarkan atas pengamatan dan nilai-nilai strategi, dimana kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan memodernisasikan Alutsista yang dimiliki oleh TNI baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta untuk memenuhi kebijakan MEF pemerintah Tahap II periode 2015-2019.

Pasca merevisi konstitusinya, kini Jepang menjadi salah satu negara dengan kekuatan pertahanan terkuat di Asia. Data dari Global Fire Power tahun 2017 menempatkan Jepang di posisi ke-7 atau nomor 3 di Asia sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Jepang hanya kalah dari Cina yang berada di posisi ke-3 dan India di posisi ke-4. Sementara Indonesia berada di posisi ke-14 atau nomor 6 di Asia atau nomor 1 di Asia Tenggara.

Saat ini Jepang dianggap memiliki peralatan tempur atau Alutsista paling modern di Asia. Pasukan Beladiri Jepang yang aktif saat ini berjumlah 250.000 personel dengan pasukan cadangan sebesar 57.900 personel. Kekuatan darat Jepang memiliki 700 unit tank berbagai jenis, 2.850 unit Kendaraan Tempur Lapis Baja (*Armored Fighting Vehicles*), 202 unit Senjata Gerak Sendiri (*Self-Propelled Guns*), 500 unit Artileri Tarik (*Towed Artillery*), 99 unit Sistem Peluncur Roket (*Multiple-Launch Rocket Systems*). Kekuatan Udara Jepang dilengkapi dengan 1.594 unit pesawat terbang, 288 unit pesawat tempur/pesawat penyergap, 287 unit pesawat tempur sayap tetap, 481 unit pesawat pengangkut, 447 unit pesawat latih, 659 unit helikopter, dan 119 unit helikopter tempur. Sedangkan kekuatan

laut Jepang dilengkapi dengan 131 unit kapal perang, 4 unit Operator Pesawat (*Aircraft Carriers*), 42 unit kapal penghancur, 6 unit kapal korvet, 17 unit kapal selam, 6 unit kapal pertahanan pesisir, dan 25 unit kapal *Mine Warfare*.²⁶ Jepang bahkan memiliki 2 unit kapal induk helikopter yang bernama Izumo dan Kaga. Kapal induk Kaga tersebut diyakini mampu mendaratkan atau menerbangkan lima helikopter sekaligus bahkan para pakar militer meyakini bahwa kapal induk Kaga tersebut mempunyai landasan pacu yang di rancang untuk menampung jet tempur termutakhir. Jepang mengaku kapal induk tersebut dibuat untuk tujuan kemanusiaan.²⁷

Keunggulan dari sistem pertahanan yang dimiliki oleh Jepang tersebutlah yang menjadi salah satu acuan atau alasan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Selain itu, kondisi geografis yang sama dengan Jepang juga menjadi salah satu alasannya, hal tersebut dikarenakan dengan kondisi geografis yang sama pastinya permasalahan yang dihadapi juga pastilah kurang lebih sama. Dengan begitu, Indonesia dengan Jepang dapat bertukar informasi dan bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan yang sama yang dihadapi oleh kedua negara tersebut.

Selain memiliki Alutsista yang banyak dan canggih, industri pertahanan Jepang juga sudah mulai di lirik oleh negara-negara di dunia. Industri pertahanan Jepang sudah banyak membuat Alutsista yang digunakan oleh Jepang saat

²⁶ Global Fire Power, *loc. cit.*

²⁷ DW, *Begini Bentuk Kapal Induk Baru Jepang*, 23 Maret 2017. Tersedia di <<http://www.dw.com/id/begini-bentuk-kapal-induk-baru-jepang/g-38085299>> [Diakses 3 Mei 2017].

ini. Pasca dibekukannya embargo senjata oleh pemerintah Jepang, kini industri pertahanan Jepang dapat mengekspor peralatan yang mereka buat kepada negara-negara yang ingin membelinya. Alutsista yang dibuat oleh industri Jepang yang sudah dipakai oleh Jepang adalah kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, tank kelas berat maupun menengah, dan peralatan-peralatan lainnya. Itu pula yang mendorong Indonesia untuk membentuk kerjasama dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Kerjasama tersebut dilakukan untuk merealisasikan kebijakan pemerintah Indonesia untuk membuat industri pertahanan yang mandiri.

Selain itu, kedekatan yang terjalin antara Jepang dengan Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang. Dengan dekatnya hubungan Jepang dengan Amerika Serikat membuat usaha Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya tidak dicurigai dan disalahartikan sebagai ancaman terhadap hegemoninya di dunia politik internasional oleh Amerika Serikat.

Keuntungan Indonesia Bekerjasama dengan Jepang dalam Bidang Pertahanan

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam bidang pertahanan dapat terwujud dikarenakan adanya kesamaan visi dan kepentingan diantara kedua negara. Indonesia dan Jepang sama-sama mengakui bahwa kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertahanan tersebut memiliki keuntungan bagi Indonesia maupun Jepang. Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dalam kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Jepang adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama tersebut akan meningkatkan saling pengertian dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Jepang.
2. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mendukung perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Pasifik maupun wilayah yang lebih luas.
3. Pertahanan yang dimiliki Indonesia semakin kokoh.
4. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang semakin kuat.
5. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk membuat industri pertahanan nasional menjadi mandiri semakin terpenuhi dengan adanya *Transfer of Technology* antara Indonesia dengan Jepang.
6. Industri pertahanan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui ekspor yang dilakukannya.
7. Tujuan pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia semakin terwujud dengan adanya kerjasama tersebut.
8. Target pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*) Tahap II semakin terpenuhi.
9. Menambah pengetahuan Indonesia terkait masalah pertahanan dengan diadakannya pertukaran ilmu pengetahuan.
10. Kedekatan antara Jepang dengan Amerika Serikat diharapkan mampu memperbaiki hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat pasca Amerika Serikat mencabut embargo senjata terhadap Indonesia.

Realisasi Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jepang

Setelah pembentukan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang pertahanan yang dituangkan ke dalam sebuah *Memorandum of Understanding*, selanjutnya kedua negara melakukan bentuk nyata atau realisasi dari kerjasama tersebut. Adapun hasil atau

bentuk realisasi dari kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Tingkat Menteri

Pertemuan tingkat Menteri untuk membahas masalah kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Jepang dilakukan dalam sebuah pertemuan *2+2 meeting* antara Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi dengan Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani dan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015 di The New Otani Hotel, Akasaka, Tokyo, Jepang yang dimulai pada pukul 14.30 waktu setempat. Pertemuan *2+2 meeting* tersebut merupakan pertemuan pertama Jepang dengan negara-negara ASEAN yang menggunakan konsep pertemuan seperti itu.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara sepakat untuk rutin melakukan pertemuan *2+2 meeting* setiap dua tahun sekali, membuat *hotline* komunikasi antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan serta sepakat untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang maritim dan transfer teknologi antara kedua negara.²⁸

Pertemuan antara Indonesia dengan Jepang tersebut akan memberikan dampak terhadap meningkatnya hubungan bilateral kedua negara dan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan serta dapat melakukan observasi komprehensif mengenai

situasi keamanan dan politik di kawasan maupun internasional.

2. Pembentukan *Indonesia-Japan Maritim Forum (IJMF)*.

Indonesia-Japan Maritim Forum dibentuk pada tanggal 21 Desember 2016. IJMF diresmikan melalui penandatanganan *Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritim Forum* oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida. Cakupan kerjanya meliputi kerjasama di bidang keamanan maritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi maritim, pembangunan infrastruktur maritim, dan pendidikan dan pelatihan maritim.²⁹

3. Kunjungan Kerja.

Pada tanggal 30 November 2016, Kepala Staf Gabungan Pasukan Beladiri Jepang Laksamana Katsutoshi Kawano melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Laksamana Katsutoshi Kawano mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang berada di Cilangkap, Jakarta.

4. Pertukaran prajurit dan pelajar.

Kerjasama dalam hal pertukaran prajurit dan pelajar sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Indonesia dan Jepang. Indonesia mengirim para prajurit dan Taruna Akademi Militer untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pertahanan Nasional Jepang (*Boeidagaku*) yang berada di Yokosuka, Jepang.

5. Bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana.

Sebenarnya kerjasama dalam hal bantuan kemanusiaan dan tanggap

²⁸ Ahmad Toriq, *Jepang dan Indonesia Sepakati Kerja Sama Transfer Teknologi Alutsista*, Detik.com, 17 Desember 2015. Tersedia di <<https://news.detik.com/berita/3098941/jepang-dan-indonesia-sepakati-kerja-sama-transfer-teknologi-alutsista>> [Diakses 3 Mei 2017].

²⁹ Humas Kemenko Maritim, *Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum*, Kemaritiman, 21 Desember 2016. Tersedia di <<https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/>> [Diakses 3 Mei 2017].

bencana sudah dilakukan oleh Indonesia dan Jepang sejak lama. Pada tahun 2004, Jepang turut membantu Indonesia ketika Indonesia dilanda bencana tsunami Aceh. Jepang memberikan bantuan dengan mengirimkan Helikopter, Kapal, dan bantuan lainnya. Indonesia juga turut membantu Jepang ketika Jepang dilanda bencana gempa bumi yang disusul dengan terjadinya tsunami pada tanggal 11 Maret 2011. Indonesia memberikan bantuan dengan mengirimkan tim satuan reaksi cepat tanggap bencana dan bantuan lainnya.

Realisasi dari kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang yang dituangkan dalam sebuah nota kesepakatan masih belum terlaksana semuanya, hal ini dikarenakan kesepakatan perjanjian tersebut baru berlangsung selama dua tahun. Diharapkan dalam sisa waktu yang telah disepakati oleh kedua negara, kerjasama tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana seluruhnya sesuai dengan yang telah disepakati di dalam nota kesepakatan tersebut.

III. Simpulan

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Indonesia yang diakibatkan oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sangat rentan untuk terjadinya tindak kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan sumber daya yang melimpah khususnya sumber daya yang berada di lautan Indonesia, membuat wilayah perairan Indonesia rentan terhadap terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian ikan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dalam mempertahankan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan sistem dan alat pertahanan atau Alutsista yang memadai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Namun, kondisi Alutsista yang dimiliki oleh TNI untuk menjaga kedaulatan Indonesia masih belum memadai. Indonesia perlu memodernisasikan Alutsista yang dimiliki oleh TNI sehingga TNI dapat bekerja dengan maksimal dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Industri pertahanan Indonesia juga masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia, hal tersebut disebabkan karena terbatasnya sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh industri pertahanan Indonesia. Hal inilah yang membuat Indonesia akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Swedia dan negara lainnya. Namun, kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan pertahananan negaranya masih belum terpenuhi seutuhnya. Untuk itulah, Indonesia mengadakan kerjasama dengan Jepang di bidang pertahanan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan negaranya.

Adapun tujuan Indonesia memilih Jepang sebagai mitra kerjasamanya di bidang pertahanan dikarenakan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas melalui modernisasi Alutsista, *Transfer of Technology*, pertukaran informasi mengenai isu pertahanan, pertukaran dan pelatihan personel, pelajar dan para ahli, dan bentuk lainnya serta pemenuhan terhadap kebijakan kekuatan pokok

minimum atau *Minimum Essential Force* Tahap II dapat terpenuhi secara maksimal.

Dari beberapa poin yang terdapat dalam nota kesepakatan tersebut, baru beberapa saja yang telah terealisasi diantaranya adalah pertemuan tingkat menteri, pembentukan *Indonesia-Japan Maritim Forum*, kunjungan kerja petinggi negara, pertukaran prajurit dan pelajar, serta bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana. Meskipun bentuk realisasi dari perjanjian kerjasama pertahanan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan waktu perjanjian yang baru berlangsung selama dua tahun. Namun diharapkan disisa waktu perjanjian yang telah disepakati, kerjasama pertahanan tersebut dapat terealisasi seluruhnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU tersebut.

Daftar Pustaka

- Armenia, Resty. *Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas*. CNN Indonesia. 31 Desember 2014. Tersedia di <<http://www.cnnindonesia.com/politik/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas/>> [Diakses 17 April 2017].
- Dam, Sjamsumar & Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Diego. *Daftar Pembelian Alutsista TNI Tahun 2017*. Jakartagreater.com. 7 September 2016. Tersedia di <<https://jakartagreater.com/daftar-pembelian-alutsista-tni-tahun-2017/>> [Diakses 19 April 2017].
- DW. *Begini Bentuk Kapal Induk Baru Jepang*. 23 Maret 2017. Tersedia di <<http://www.dw.com/id/begini-bentuk-kapal-induk-baru-jepang/g-38085299>> [Diakses 3 Mei 2017].
- Global Fire Power. *Indonesia Military Strength, Current Military Capabilities and Available Firepower for 2017 Detailed*. Tersedia di <http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia> [Diakses 19 April 2017].
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Humas Kemenko Maritim. *Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum*. Kemaritiman. 21 Desember 2016. Tersedia di <<https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/>> [Diakses 3 Mei 2017].
- Jane. *Indonesia, Pertumbuhan Anggaran Pertahanan Terbesar di Asia Pasifik*. JakartaGreater.com 25 Mei 2015. Tersedia di <<https://jakartagreater.com/indonesia-pertumbuhan-anggaran-pertahanan-terbesar-di-asia-pasifik/>> [Diakses 18 April 2017].
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Hubungan Perekonomian Indonesia-Jepang*, Tersedia di <http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html> [Diakses 11 April 2017].
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- Kusuma, Dewi Rachmat. *Menhan Ajukan Dana Pertahanan Rp 532 T Untuk 5 Tahun, Naik 44%*. Detik.com. 19 Oktober 2015. Tersedia di <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3047579/menhan-ajukan-dana-pertahanan-rp-532-t-untuk-5-tahun-naik-44>> [Diakses 18 April 2017].
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Militerhankam, *Modernisasi dan Pembelian Alutsista Baru Militer Indonesia 2017*, Tersedia di <<http://www.militerhankam.com/2017/03/modernisasi-dan-pembelian-alutsista.html>> [Diakses 18 April 2017].
- Opie. *Perjanjian Pampasan Perang Jepang*. 29 Oktober 2014. Tersedia di <<http://www.sejarawan.com/190-perjanjian-pampasan-perang-jepang.html>> [Diakses 3 April 2017].
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2015. Memorandum Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang Tentang Kerjasama dan Pertukaran di Bidang Pertahanan.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 650.
- Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 200.
- Supriyanto, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tempo.co, *Kekuatan Militer Indonesia Peringkat Keempat Asia*, 12 Agustus 2016. Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/2016/08/12/078795512/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-keempat-asia>> [Diakses 18 April 2017].
- Toriq, Ahmad. *Jepang dan Indonesia Sepakati Kerja Sama Transfer Teknologi Alutsista*. Detik.com. 17 Desember 2015. Tersedia di <<https://news.detik.com/berita/3098941/jepang-dan-indonesia-sepakati-kerja-sama-transfer-teknologi-alutsista>> [Diakses 1 Mei 2017].
- Yani, Yanyan Mochamad. *Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis*. 14 Mei 2008. Tersedia di <http://repository.unpad.ac.id/5894/1/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf> [Diakses tanggal 20 November 2016].